

Paradigma Ideal Solusi Keantarbudayaan di Indonesia: Konsensual Atau Instruksional?

Tarekh Febriana Putra^{1,a*}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ tarekh.febriana11@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Januari 2024;

Revised: 13 Januari 2024;

Accepted: 16 Januari 2024.

Kata-kata kunci:

Keantarbudayaan;

Konsensual;

Instruksional.

: ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi potensi faktor budaya untuk memicu konflik di masa depan di Indonesia, berdasarkan asersi Samuel P. Huntington dalam "*The Clash of Civilization*" bahwa konflik budaya akan melampaui konflik ekonomi atau ideologi. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk lebih memahami dinamika antarbudaya yang mungkin menyebabkan konflik identitas. Dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini menginterpretasikan nuansa pertemuan antarbudaya yang secara historis telah memolarisasi identitas, mempromosikan persatuan atau perpecahan dalam struktur sosial. Konflik sosial terkini di Indonesia, yang tampaknya tidak terkait dengan budaya, tetap saja mengungkapkan persimpangan budaya yang dalam. Contohnya termasuk kontroversi tentang kesesuaian agama seni pertunjukan wayang dan pelestarian bahasa versus kebijakan integrasi nasional, menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya menjadi dasar konflik ini. Temuan ini sejalan dengan teori Huntington, menekankan relevansi faktor budaya dalam konflik sosial kontemporer. Penelitian ini memberikan kontribusi pada diskursus yang lebih luas mengenai dampak dinamika budaya terhadap kesatuan nasional dan konflik sosial, mengusulkan bahwa pemahaman dan pengakuan yang lebih dalam terhadap perbedaan budaya sangat penting dalam mencegah potensi konflik di negara-negara multi-etnis seperti Indonesia.

ABSTRACT

The Ideal Paradigm of Intercultural Solutions in Indonesia: Consensual or Instructional? This study explores the potential of cultural factors to trigger future conflicts in Indonesia, based on Samuel P. Huntington's assertion in "The Clash of Civilizations" that cultural conflicts will surpass those rooted in economic or ideological differences. This research adopts a qualitative approach to better understand the dynamics of intercultural interactions that may lead to identity conflicts. By conducting interviews, observations, and document analysis, the study interprets the nuances of intercultural encounters that have historically polarized identities, promoting either unity or division within social structures. Recent social conflicts in Indonesia, which may not appear culture-related at first glance, still reveal profound cultural intersections. Examples include controversies over the religious appropriateness of wayang performance art and the preservation of language versus national integration policies, illustrating how cultural values underpin these conflicts. The findings align with Huntington's theory, emphasizing the relevance of cultural factors in contemporary social conflicts. This research contributes to the broader discourse on the impact of cultural dynamics on national unity and social conflict, proposing that a deeper understanding and acknowledgment of cultural differences are crucial in preventing potential conflicts in multi-ethnic countries like Indonesia.

Keywords:

Interculture;

Consensual;

Instructional.

Copyright © 2024 (Tarekh Febriana Putra). All Right Reserved

How to Cite : Putra, T. F. (2024). Paradigma Ideal Solusi Keantarbudayaan di Indonesia: Konsensual Atau Instruksional?. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(3), 86–90. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2074>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dalam bukunya yang berjudul *The Clash of Civilization*, Samuel P. Huntington (2003, hlm. 160) mengutip pemikiran Presiden Masyarakat Eropa yaitu Jacques Delors. Dalam pandangannya, dengan berani ia mengungkapkan bahwa ‘konflik masa depan akan dicetuskan oleh faktor-faktor budaya daripada ekonomi atau ideologi’. Pernyataan ini tentunya menarik banyak perhatian para ilmuwan sosial dan politik. Diantara beberapa yang menolak paling keras adalah Francis Fukuyama yang menolak tesis tersebut dengan menulis buku *The End of History*. Terlepas dari berbagai perdebatannya, keterangan mengenai hubungan kebudayaan dan konflik yang disampaikan oleh Huntington perlu dipertimbangan sebagai kajian eskatologis politik.

Paradigma yang menghubungkan antara konflik dan peradaban tersebut telah memperluas makna dari kebudayaan, yang semula cenderung kepada pengertian yang positif, tetapi pada konteks ini dinilai sebagai sesuatu yang berpotensi dapat menimbulkan konflik (Sri dkk, 2021). Fenomena ini adalah suatu hal yang wajar sebagai bentuk implikasi dari keluasan makna dalam suatu konsep (Paramitha et al., 2022). Sebagaimana dalam pandangan filsafat bahwa bukanlah konsep yang memberikan makna pada konsumsi akal, melainkan akal manusialah yang memberikan makna terhadap konsep (Abdillah, 2014). Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah terdapat banyak sudut pandang yang timbul terhadap sebuah konsep (Mawarti, 2018). Pemaknaan ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap sebuah makna menjadi sangat fleksibel. Termasuk pemaknaan terhadap konsep keantarbudayaan (Wahyudi & Kurniasih, 2021).

Konsep keantarbudayaan pada mulanya dibentuk secara definitif sebagai suatu model *movement, communication, dynamics, encounter between cultures* (Sarmento, 2014). Akan tetapi, secara praktis konsep keantarbudayaan ternyata ditafsirkan dengan sangat multidimensi. Beberapa pihak memandang keantarbudayaan sebagai pemersatu (konsep wawasan nusantara) (Paramitha et al., 2021). Sebagian pihak lain memandang keantarbudayaan sebagai sumber identitas yang membedakan. Pada situasi terkini, bahkan keantarbudayaan ternyata telah menjadi konsep yang dijadikan sebagai alasan untuk membangun konflik identitas (Anggraeni et al., 2020).

Dalam konteks ini, keantarbudayaan dipandang sebagai konsep yang memberikan batasan antara satu identitas dengan identitas lainnya (Christian, 2017). Perbedaan identitas tersebut dapat meliputi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan (Malihah et al., 2020). Itu sebabnya, dalam upaya membangun suatu masyarakat yang kondusif konsep yang dikenalkan adalah akulturasi dan toleransi (Takdir, 2017). Sedangkan, konsep untuk mengukuhkan identitas masing-masing budaya atau disebut juga dengan *chauvinisme* sangat dibatasi untuk muncul, bahkan dianggap sebagai perbuatan tercela (Mangunwijaya, 1999). Hal itu terjadi karena secara hakikat budaya itu sejatinya telah membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya (Setyawan & Arifin, 2019). Maka dari itu, tidak heran ketika Patih Gajah Mada memperkenalkan konsep Nusantara-nya untuk menyatukan budaya-budaya, karena ia memahami bahwa terdapat banyak perbedaan yang membedakan antar satu kebudayaan dan kebudayaan lainnya. Dengan beberapa fakta dan ide sebagaimana dijelaskan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memahami maksud dari argumentasi Huntington (2003) yang meyakini bahwa konflik masa depan lebih cenderung diakibatkan oleh faktor-faktor kebudayaan.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman interpretatif terhadap fenomena sosial atau manusia. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya untuk memahami dan menjelaskan fenomena alamiah yang dialami oleh subjek penelitian, tanpa menggunakan pendekatan perhitungan matematis. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sesuai dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau area pada populasi tertentu dengan akurat dan sistematis. Proses

pengolahan dan analisis data mengacu pada metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga kegiatan utama: reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang diteliti melalui analisis yang teliti dan interpretatif.

Hasil dan pembahasan

Berikut ini penulis akan memaparkan fakta-fakta kontekstual yang memberikan bukti dan gambaran faktual mengenai konflik identitas dan hubungannya dengan keantarbudayaan di Indonesia. Sejak satu tahun terakhir saat esai tulisan ini diuraikan, terdapat beberapa konflik sosial yang sebetulnya bukanlah konflik kebudayaan. Akan tetapi, konflik tersebut ternyata beririsan dengan konsep keantarbudayaan. Sebagai contoh, konflik dan pertentangan tentang *haram-halalnya* kesenian wayang sebagai alat dan metode untuk menyampaikan pesan agama. Terlepas dari perdebatannya, perlu kita ingat bahwa sebetulnya pertentangan tersebut sebetulnya adalah konflik dalam klasifikasi agama. Namun, konflik tersebut semakin tinggi dan kukuh ketika melibatkan nilai-nilai kebudayaan. Apalagi, saat golongan orang yang mengharamkan wayang bukanlah orang yang bukan menjadikan wayang sebagai keseniannya.

Fakta kedua, konflik mengenai ide pembatasan bahasa daerah oleh seorang pejabat politik. Dalam satu sisi, konflik tersebut menguatkan proposisi kebanggaan masyarakat dalam mempertahankan budayanya. Akan tetapi, dalam sisi lain membuktikan bahwa kebudayaan adalah konsep *pembeda* karena dapat mengukuhkan suatu konflik dari setiap identitas perbedaan. Dalam kajian global, bahkan dapat kita menganalisa bahwa konflik politik antara Rusia dan NATO adalah bagian dari dampak konflik identitas kebudayaan pasca perang dingin. Dengan pemaparan sebagaimana dijelaskan diatas, penulis memberikan perhatian bahwa pemikiran Huntington menjadi cukup kontekstual ketika dianalisa dengan kajian pertentangan dan konflik sosial pada masa saat ini.

Pada bagian ini, penulis berusaha menginterpretasikan penyebab secara teknis mengapa kebudayaan pada situasi saat ini dapat dipandang sebagai suatu potensi yang menimbulkan konflik identitas dalam tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan. Pada intinya, setiap lapisan sosial dalam warga negara memiliki kontribusi dalam membatasi atau bahkan mempercepat potensi keantarbudayaan untuk menjadi suatu konflik identitas. Apabila dikaji berdasarkan klasifikasinya, tipe warga negara dapat dikelompokkan menjadi *stone citizens*; *sponge citizens*; *generator citizens* (Nadine & Clark, 1989; Soemantri, 2001; Budiarti, 2015). Secara sederhana pola penyebab yang terbentuk adalah *stone citizens* yang menjadi penyebab munculnya konflik identitas berdasarkan kebudayaan, *sponge citizens* yang menjadi katalis (meramalkan) konflik tersebut, dan *generator citizens* yang bisa jadi menguatkan posisinya apabila mereka tidak menyadari adanya konflik budaya yang ada.

Solusi yang dapat dikembangkan dalam mengatasi ini setidaknya adalah dengan mengembalikan harkat kebudayaan daerah sebagai sumber kebudayaan nasional, sebagaimana amanat yang telah disampaikan oleh para *founding father* dalam penyusunan konstitusi saat sidang BPUPKI yang kedua. Selain itu, sesuai dengan Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara harus hadir dengan berani menampilkan bahwa kebudayaan adalah konsep yang dapat menjadi potensi disintegrasi. Oleh sebab itu, kebudayaan nasional harus tetap konsisten untuk bersumber pada kebudayaan daerah.

Simpulan

Persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera terhadap ideologi kenegaraan adalah memandang Pancasila sebagai suatu sistem nilai yang harus ditaati sebagai sebuah konsensus dan kesepakatan. Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Kader

Partai Keadilan Sejahtera tidak menolak nilai-nilai idiil Pancasila, karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pelaksanaan politik kenegaraan melalui sistem demokrasi dipandang sebagai langkah strategis dalam implementasi politik negara. Pelaksanaan demokrasi tidak menyalahi prinsip *siyasi islam*. Kader Partai Keadilan Sejahtera memandang hukum kenegaraan sebagai regulasi operasional yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara yang baik, hukum kenegaraan wajib ditaati ketika tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Apabila bertentangan, secara konstitusional dapat mengajukan perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi politik Partai Keadilan Sejahtera meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang memberikan pengaruh secara intervensi dari luar faktor diri, diantaranya faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan masyarakat, faktor lingkungan kerja, faktor latar belakang pendidikan, dan faktor latar belakang sosial budaya. Faktor internal adalah hal yang memberikan pengaruh terhadap pembentukan persepsi yang muncul dari pengaruh proses kognisi atau interpretasi sendiri.

Referensi

- Anggraeni, L., Darmawan, C., & Tanszil, S. W. (2020). *The Use of Comic-Based Technology: Media Cultivation of Values in the Nation Defense*. 418(Acec 2019), 428–431. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.081>
- Abdillah, J. (2014). Dekonstruksi Tafsir Antroposentrisme: Telaah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan. *Kalam*, 8(1), 65-86.
- Budiarti, Y. (2015). Pengembangan Kemampuan Kreativitas Dalam Pembelajaran. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 3(1), 61–72. <https://doi.org/10.24127/ja.v3i1.143>
- Christian, S. A. (2017). Identitas budaya orang tionghoa Indonesia. *Jurnal Cakrawala Mandarin*, 1(1), 11-22.
- Danim. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Hutington, S. P. (2003). *The Clash of Civilization* (A. F. Maruf (ed.); 1st ed.). IRCiSoD.
- Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia? *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373>
- Mangunwijaya, Y. B. (1999). *Pasca-Indonesia pasca-Einstein: esei-esei tentang kebudayaan Indonesia abad ke-21*. PT Kanisius.
- Mawarti, S. (2018). Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 83-95.
- Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Anggraeni, L., Noviyanti, M., Ilsa, F., Gilang Ramadhan, M., Maharani, A., & Kodrat, H. (2021). Analysis and evaluation of law number 12 of 2012 concerning higher education based on sports needs for students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 191–199. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/42249>
- Paramitha, S. T., Komarudin, Fitri, M., Anggraeni, L., & Ramadhan, M. G. (2022). Rethinking the Relationship between Technology and Health through Online Physical Education during the Pandemic. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 10(1), 132–144. <https://doi.org/10.46328/ijemst.2165>
- Sarmiento, C. (2014). Interculturalism, multiculturalism, and intercultural studies: Questioning definitions and repositioning strategies. *Intercultural Pragmatics*, 11(4), 603–618. <https://doi.org/10.1515/ip-2014-0026>
- Setyawan, N. B., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Terhadap Toleransi Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nurani: Jurnal Kajian Syariat dan Masyarakat*, 19(1), 27-34.
- Sri, B., Hendar, E., & Veronika, P. (2021). *Mengembangkan Kompetensi Komunikasi Antarbudaya berbasis Kearifan Lokal untuk Membangun Keharmonisan Relasi Antar Etnis dan Agama*. BuatBuku. com.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Takdir, M. (2017). Model-model kerukunan umat beragama berbasis local wisdom. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(01), 61-83.

Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021). Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi “Jihad Milenial” ERA 4.0. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 1-20.